

PENGARUH BELANJA DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN

Muhammad Anugrah Ardhana¹

¹ Universitas Andi Djemma

Email: anugrahardhana22@gmail.com

Abstract: *The management of regional finances is very big influence on the fate of an area because the region can be a strong and powerful area and able to develop its greatness or become powerless depending on how to manage its finances. This research aims to find out; The influence of shopping districts, a special allocation of Funds, the Fund allocation of Public Financial Manager on performance Area in the town of Palopo. This research was conducted in Palopo. The study is observational, analytic with cross sectional design of the study. The population in this study are SKPD structural officials, namely Head of SKPD, Secretary, Head of Division, and Head of Sub-division of Regional Financial Planning and Management. The type of data to be used in this research is secondary data in the form of "time series" that is quantitative, i.e. data-shaped figures. The data were analyzed by multivariate Analysis in the study carried out using logistic regression test. The results of this study indicate that 1) there are no significant influence of variable local government spending of financial performance against Palopo ($p = 0.130$). 2) there is a significant influence on performance of Finance Area DAU Area Palopo ($p = 0,011$). 3) there is no significant influence of the variable DAK the region against financial performance area of Palopo ($p = 0.059$).*

Keywords: *Local Government Spending; General Allocation Fund, Special Fund Allocation; Financial Performance*

Abstrak: *Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pengaruh belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja pengelola Keuangan Daerah Di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Palopo. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan rancangan *cross sectional* studi. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPD yaitu Kepala SKPD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, serta Kasubag Perencanaan dan pengelola keuangan daerah. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk "*time series*" yang bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka. Data dianalisis dengan Analisis multivariate dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tidak ada pengaruh signifikan variabel Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo ($p=0.130$).*

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2) Ada pengaruh signifikan DAU Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo ($p=0.011$). 3) Tidak ada pengaruh signifikan variabel DAK Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo ($p=0.059$).

Kata Kunci: Belanja Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Kinerja Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat.

Pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keuangan diantaranya: (1) Penerimaan daerah dari bagi hasil sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki sumber daya alam seperti minyak gas alam dan hasil tambang lainnya, (2) penerimaan daerah dari bagi hasil pajak yang merupakan dana yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagian daerah ini tergolong sebagai penerimaan daerah dengan presentase pembagiannya tidak mengalami perubahan dan, (3) sekema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni Dana alokasi Umum (DAU) yang formulanya beberapa kali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perubahan-perubahan tersebut diatas memungkinkan adanya efek ketimpangan dan pemerataan. Ketika pemerintah pusat mengeksplorasi sumberdaya alam maka yang terjadi ketimpangan fiskal vertikal (pusat dan daerah) maka untuk mengoreksi ketimpangan fiskal (pusat dan daerah) dilakukan dengan mekanisme dana bagi hasil efek sampingnya dana bagi hasil adalah ketimpangan horizontal (antar daerah) maka di stimulasi dengan mekanisme transfer yaitu dana alokasi umum.

Salah satu hal yang sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan pada otonomi daerah yaitu masalah pendanaan. Untuk menanggulangi hal tersebut,

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan fiskal ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan secara mandiri ketika pemerintah daerah memaksimalkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan dari daerahnya sendiri. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Nizar, 2009)

Dilaksanakannya otonomi daerah ini membuat daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Sidik, 2002:1). Kewenangan yang lebih besar ini akan membutuhkan biaya yang begitu besar. Namun diharapkan dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan ini, pemerintah daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Adi, 2006). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berputar di pusat (Kuncoro, 2004). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 – 32 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara/Daerah dan badan lainnya. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Palopo Tahun 2013 sejumlah 160.819, secara rinci menurut jenis kelamin masing-masing 78,509 jiwa laki-laki dan 82.310 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,38%. Pertumbuhan penduduk mencapai 2,88 persen pertahun, misalnya dari 105.703 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 160.819 jiwa pada tahun 2013. Jumlah rata – rata anggota dalam satu rumah tangga

**Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan**

pada keadaan akhir tahun 2013 tercatat sebesar 4,59 atau dengan kata lain setiap rumah tangga di Kota Palopo beranggotakan 4 - 5 orang.

Jika dicermati dari aspek kelompok usia, struktur penduduk Kota Palopo didominasi oleh kelompok usia produktif, dari 160.819 jiwa penduduk sekitar 32,35 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,09 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya 63.56 persen yang berada pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun). Ini berarti Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 51,33 persen. Artinya, penduduk Kota Palopo yang berusia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung beban bagi penduduk yang belum dan atau tidak produktif sekitar 51-52 orang dari jumlah penduduk secara total.

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB, struktur perekonomian Kota Palopo ditopang oleh empat sektor terbesar yakni sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 23,64 %, Jasa-Jasa 19,42 %, Petanian 15,86 % dan Keuangan, Persewaan 15,70%, Perkembangan presentase kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Riil Per Sektor Kota Palopo 2013 - 2016

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	21,96	18,03	17,12	15,86
2	Pertambangan & Penggalian	0,15	0,14	0,14	0,11
3	Industri Pengolahan	3,80	3,65	3,45	3,40
4	Listrik dan Air Bersih	1,65	1,71	1,73	1,80
5	Bangunan	11,29	12,11	11,01	10,74
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	20,11	21,42	22,85	23,64
7	Angkutan dan Komunikasi	8,99	9,21	9,13	9,33
8	Keuangan, Persewaan	13,12	14,16	14,94	15,70
9	Jasa-Jasa	18,92	19,58	19,64	19,42
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Kota Palopo, 2017

Pertumbuhan riil beberapa sektor sejalan dengan kontribusi pada PDRB yang juga berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo antara lain sektor Listrik/gas dan Air, sektor Perdagangan, dan sektor Bank Lembaga Keuangan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 8,99%, pertumbuhan ini dipicu oleh kinerja positif semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 10,57%. Kinerja terbaik terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh hingga

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

16,14% selain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,04%.

Tiga sektor yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Palopo yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 3,28% terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi memberikan kontribusi sebesar 2,46% sedang sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 1,01%.

Pertumbuhan ekonomi kota palopo kurun waktu 3 tahun terakhir bergerak di atas angka 8 persen. Jika pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,50 persen, dan tahun 2015 menguat sekitar 8,30 persen hingga tahun 2016 yakni sebesar 8,86 persen. Hingga Tahun 2016 masih menguat menjadi 8,99 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini melampaui target yang menjadi salah satu sasaran stratejik dalam pembangunan bidang ekonomi di daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu upaya untuk mempertahankan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8 %.

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada banyaknya tuntutan, salah satunya adalah tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah mampu menciptakan masyarakatnya yang sejahtera. Tuntutan ini merupakan implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasi di daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus melakukan pembangunan di segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk pembangunan sumber daya manusia.

Hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2012 s/d 2016) Pemerintah Kota Palopo telah memperlihatkan upaya perbaikan kinerja dalam hal Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja serta aktivitas pelayanan publik yang lebih baik, namun disisi lain Opini LHP-BPK , atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo mendapat Opini: Tahun 2012 DISCLAIMER , tahun 2013

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

DISCLAIMER, tahun 2014 WDP, tahun 2015 DISCLAIMER dan tahun 2016 memperoleh WDP (Ikhtiar LHPS BPK-II tahun 2016).

Sesuai pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan, maka target dan realisasi Pendapatan Daerah yang dapat dicapai dalam Tahun Anggaran 2016. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2016 sebesar Rp. 1.004.763.409.300,00 atau 103,64% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 784.583.358.946,00, realisasi ini tidak termasuk realisasi yang bersumber dari perhitungan pihak ketiga.

Komposisi pengelolaan dan klasifikasi realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dimana masih terdapat beberapa jenis Objek Pendapatan Daerah yang masih perlu dikelola secara intensif pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, kendala lainnya yaitu Produktivitas pemanfaatan asset / kekayaan daerah sebagai obyek Retribusi masih relatif rendah serta penyaluran realisasi penerimaan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat belum dilaksanakan tepat waktu

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Fajar Nugroho, Abdul Rohman (2016), menyimpulkan bahwa Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya, dimana PKKD berarti adalah peningkatan capaian dari suatu hasil kerja

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian Ariani (2010), menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika DAU bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat efisiensi daerah yang merupakan rasio dari kinerja keuangan daerah. Rukmana (2013) juga menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU. Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Julitawati (2012) menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penelitian yang dilakukan Marizka (2013), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kinerja keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Yani (2002), Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika Dana

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka kinerja keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah maka kinerja keuangan daerah semakin besar.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kota Palopo, SKPD yang mewakili pusat belanja, pusat pendapatan, pusat pelayanan publik, dan pusat administrasi/ pengelola keuangan kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel dari penelitian ini adalah Aparat pemerintah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengusulan anggaran pemerintah daerah. Fokus responden penelitian ini adalah pejabat struktural SKPD yaitu Kepala SKPD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, serta Kasubag Perencanaan dan pengelola keuangan daerah.

3.2. Metode Analisis Data

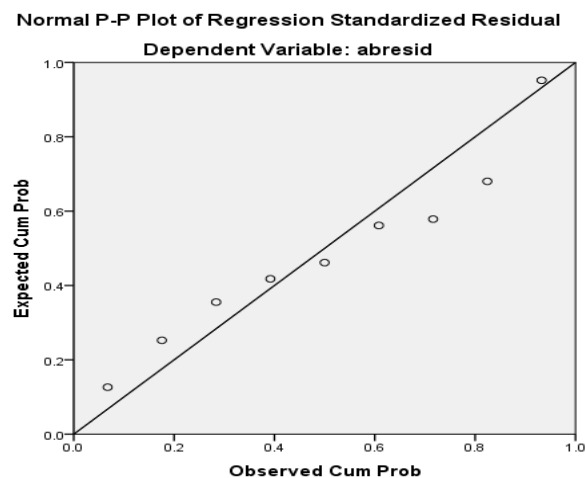
Untuk menguji hipotesis metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *t-test*, *F-test* dan Koefisien Determinasi (R^2). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang akan diteliti dalam suatu situasi. Berdasarkan dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan metode analisis uji regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

1. Uji Normalitas

Pada gambar di bawah terlihat data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.



Gambar 1. Uji Normalitas

2. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DAU	.046	21.506
DAK	.044	22.603
Belanja Daerah	.014	69.446

Sumber Data Diolah

Dengan menggunakan besaran tolerance (α) dan *variance inflation factor* (VIF) dapat dilihat bahwa VIF belanja daerah adalah $69.446 < 10$, dana alokasi umum adalah $21.506 < 10$ dan dana alokasi khusus adalah $22.603 < 10$. Tolerance variabel bebas belanja daerah adalah (0,014) dana alokasi umum adalah (0,046) dan dana alokasi khusus adalah (0,044). Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

ada variable memiliki nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	578.8759068	20.12819369		.288	.785
DAU	-.204	.175	-2.028	-1.162	.298
DAK	-.166	.198	-1.502	-.839	.440
Belanja	.155	.138	3.537	1.128	.311

Sumber: Data Diolah

Nilai t-statistik dari variabel independent pada table di atas tidak ada yang signifikan secara statistic, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independent. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependent dengan suatu persamaan.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	510.1218327	45.278452322.76	
DAU	1.560	0.394	0.429
DAK	1.083	0.446	0.270
Belanja Daerah	0.560	0.310	0.353

Sumber: Data Diolah

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga terbentuklah persamaan seperti berikut ini:

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

$$Y = 510.1218327 + 1.560 (DAU) + 1.083 (DAK) + 0.560 (Belanja Daerah) + e$$

Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen yang paling berpengaruh adalah variabel DAU dengan nilai koefisien sebesar 1.560 yang berarti bahwa jika variabel DAU naik sebesar satu poin maka variabel kinerja keuangan akan naik sebesar 1.560 poin, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel belanja daerah dengan nilai koefisien 0.560 yang berarti bahwa jika variabel belanja daerah naik sebesar satu poin maka variabel kinerja keuangan akan turun sebesar 0.560 poin, dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel bebas semua berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

5. Koefisien Determinasi

Berikut ini tabel koefisien determinasi yang dihasilkan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.999 ^a	0.997	0.996	25.910395528.44

Sumber: data diolah

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa besarnya R² adalah 0.997, hal ini berarti 99.7% variasi dari kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen sedangkan sisanya (100% - 99.7% = 0.3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

6. Uji Signifikansi (Uji F)

Hasil perhitungan uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.224 x 10 ²⁴	3	4.081 x 10 ²³	607.855	0.000 ^b
Residual	3.357 x 10 ²¹	5	6.713 x 10 ²⁰		
Total	1.228 x 10 ²⁴	8			

Sumber : Data Diolah

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan uji ANOVA atau uji statistik F didapat nilai F hitung sebesar 607.855 dengan tingkat probabilitas 0.000. Probabilitas lebih kecil jika dibandingkan 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

7. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	510.1218327	45.278452322.76		0.113	0.915
DAU	1.560	0.394	0.429	3.956	0.011
DAK	1.083	0.446	0.270	2.432	0.059
Belanja Daerah	0.560	0.310	0.353	1.809	0.130

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: data diolah

Dari hasil analisis pada penelitian ini kemudian diperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara untuk DAK dan Belanja Daerah masing-masing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis dana alokasi khusus diperoleh t hitung > t tabel yaitu $2.432 < 2.447$ hal ini berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta belanja daerah diperoleh t hitung > t tabel yaitu $1.809 < 2.447$ hal ini berarti belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah Kota Palopo dan bernilai positif. Hal ini berarti naik turunnya DAU dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, ini disebabkan karena variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kota Palopo adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan di daerah kota Palopo untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Kota Palopo. Berkaitan

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabianus (2012), yang mencoba meneliti analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di daerah yogyakarta dengan belanja daerah sebagai variabel intervening. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Belanja daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening.

Pernyataan Abdul Halim (2009), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU, setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat daerah “Kaya”. Daerah kaya berdasarkan penetapan di atas tidak memperoleh DAU.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Kota Palopo

DAK dialokasikan kepada daerah Palopo untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi prioritas daerah. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Julitawati (2012), yang menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Serta hasil penelitian Rukmana (2013), juga menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Secara empiris, hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan,

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam menjalankan Kebijakan DAK, langkah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan (iv) administrasi pengelolaan DAK. Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 jelas dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan dan program yang akan didanai tersebut merupakan program yang diusulkan oleh kementerian teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelum ditetapkan dan sesuai dengan RKP. Tahapan berikutnya adalah ketetapan program tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penghitungan alokasi DAK.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran. Jika kebocoran itu terjadi menunjukkan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah rendah.

3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerahkota Palopo dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerahkota Palopo. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiscal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah terkhusus kota Palopo seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerahkota Palopo.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan telaah dokumen terkait pengelolaan belanja daerah Kota Palopo Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

a) Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b) Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

4. Realisasi Belanja Daerah Kota Palopo

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya mengisyaratkan susunan struktur belanja daerah dalam APBD Tahun 2016 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka secara teknis struktur belanja daerah APBD Tahun 2016 dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, hibah, Belanja Bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara pada Kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

5. KESIMPULAN

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo, disebabkan karena variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kota Palopo adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan di daerah kota Palopo untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Kota

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Palopo. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo, karena Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang sehingga tidak begitu mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo, Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerahkota Palopo dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerahkota Palopo dana tersebut merupakan dana yang telah memiliki pos pendanaannya masing-masing sehingga tidak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan daerah palopo.

Adapun saran yang diajukan kepada Pemerintah daerah adalah dalam Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pada pemenuhan alokasi belanja daerah kota Palopo agar kiranya dilakukan dengan tetap mempedomani sistem dan prosedur serta jadwal Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai jadwal Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai amanah PP No. 58 Tahun 2005, Permendari No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 Tahun 2011). Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Diharapkan bagi pemerintah Kota Palopo dengan adanya dana alokasi umum dan khusus untuk memperhatikan pengawasan yang tetap agar dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya sehingga dapat tepat sasaran untuk mendanai keperluan daerah sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Christy, Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah*. Lombok: SMA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- BPS, *Makassar Dalam Angka Berbagai*.

Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

- , *Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Berbagai*.
- BPS-Bappenas-UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
- , 2004. *National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Dewi, Adha. 2006. *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah kota Singkawang*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Dwi Bastias, Desi, 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Gujarati, Damodaran. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1997, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
- Kuriata Ginting S., Charisma, 2008, *Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. *World Bank Working Paper* No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yatidan Bambang Tribudhi M. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.
- Musgrave, Richard A. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Jakarta: Erlangga
- Nasution, Abdul Aziz, 2010, *Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai*, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Skripsi
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang *Dana Perimbangan*
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. *Economic Growth and Human Development in Latin America*. *Cepal* No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik; Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syaiful. 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta

**Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan**

- Todaro, Michael P., 2006. *Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga* Edisi 9, Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press
- , 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- Usman, Syaikh et al., 2008. Laporan Penelitian: *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- World Bank, 2006. *World Development Report*.